



## LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : 28799/KA/10/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Nasional PBJ Tahun 2023

18 Oktober 2023

Yth. **1. Para Sekretaris Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga;**  
**2. Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden menginstruksikan untuk mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.

Berkenaan dengan implementasi atas instruksi Presiden dimaksud, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku instansi pembina Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan **Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023** dengan tema "**Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju**". Rapat Koordinasi Nasional ini akan dihadiri oleh Menteri/Panglima TNI/Kepala Kepolisian RI/Kepala Lembaga/Kepala Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) K/L/Pemda, Ketua/Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/Pemda, perwakilan Asosiasi Penyedia dan Asosiasi Profesi Pengadaan (IAPI dan IFPI).

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengharapkan Saudara/i dapat menugaskan Kepala UKPBJ dan Ketua/Koordinator LPSE untuk menghadiri acara yang diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa - Rabu, 7 - 8 November 2023  
Waktu : 07.30 - 16.00 WIB  
Tempat : Hotel Bidakara, Jakarta

Bersama surat ini kami sampaikan agenda sebagaimana terlampir. LKPP hanya menanggung biaya pelaksanaan Rakornas PBJ 2023 (paket fullday meeting) sehingga pembiayaan untuk akomodasi dan perjalanan dinas peserta ditanggung oleh masing-masing instansi. Registrasi dapat dilakukan melalui tautan berikut [rakornaslkpp2023.id](https://eoffice.lkpp.go.id). Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, dapat menghubungi narahubung pada tautan tersebut atau lampiran surat ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Kepala LKPP,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Hendrar Prihadi

Tembusan :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman

<https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 9QoUpl

Nomor Tiket : SK202310180002

1. Para Menteri;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintahan non Kementerian;
3. Para Gubernur;
4. Para Bupati/Walikota;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : 9QoUpl  
**Nomor Tiket** : SK202310180002

## LAMPIRAN

### AGENDA KEGIATAN

**Hari, tanggal** : Senin, 6 November 2023  
**Tempat** : Booth Registrasi Lantai 1  
**Waktu** : 13.00 - 18.00 WIB  
**Kegiatan** : registrasi ulang (penyerahan seminar kit dan perlengkapan rakornas lainnya)

**Hari, tanggal** : Selasa, 7 November 2023  
**Ruang** : Birawa & Binakarna

Waktu	Kegiatan	Keterangan
07.30 - 08.50	Registrasi	
08.50 - 08.55	Safety Briefing	MC
08.55 - 09.00	Presiden RI memasuki ruangan	
09.00 - 09.05	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	
09.05 - 09.15	Pembacaan Doa	
09.15 - 09.25	Atraksi Pembukaan	
09.25 - 09.30	Laporan Kepala LKPP	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
09.30 - 09.35	Sambutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
09.35 - 09.40	Arahan Presiden RI	Presiden RI
09.40 - 09.45	Prosesi Pembukaan Acara	Presiden RI, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
09.45 - 09.55	Prosesi Launching Produk Transformasi Pengadaan	Presiden RI, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
09.55 - 10.15	Presiden RI meninggalkan ruangan dilanjutkan dengan konferensi pers	
10.15 - 11.45	Talkshow Transformasi Pengadaan Terus Melaju untuk Indonesia Maju	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ketua Kamar Dagang Indonesia



<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
11.45 - 11.55	MoU Sekolah Pengadaan (S2 Manajemen Pengadaan)	Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia dan Universitas Diponegoro
11.55 - 12.10	<i>National Procurement Award</i>	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12.10 - 13.30	Ishoma	
13.30 - 15:00	<i>Success Story</i> K/L/Pemda untuk penggunaan PDN, produk UMK-K dan capaian ITKP	
15.00 - 15.15	<i>IAPI Award</i>	Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
15.15 - 15.30	Penutupan kegiatan hari pertama	

**Hari, tanggal** : Rabu, 8 November 2023

**Ruang** : Birawa

<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
08.00 - 09.00	Registrasi	
09.00 - 10.30	Diskusi Panel: Transformasi Kebijakan Pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
10.30 - 12.00	Diskusi Panel: Transformasi Digital Pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PT. Telkom Indonesia, Tbk
12.00 - 13.00	Ishoma	
13.00 - 14.30	Diskusi Panel: Strategi Pengadaan melalui Konsolidasi PBJ dan Clearing House	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia
14.30 - 16.00	Diskusi Panel: Strategi dan Arah Pengembangan SDM PBJ di Era Disrupsi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

**Ruang : Binakarna**

<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
08.00 - 09.00	Registrasi	
09.00 - 10.30	Diskusi Panel: Supply by Owner	LKPP, Institut Teknologi Bandung Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
10.30 - 12.00	Diskusi Panel: Penggunaan PDN dalam PBJ	LKPP, Kementerian Perindustrian
12.00 - 13.00	Ishoma	
13.00 - 14.30	Diskusi Panel: Peran APH dalam menangani Korupsi PBJ	KPK, Kejaksaan RI, Kepolisian RI
14.30 - 16.00	Diskusi Panel: Kontrak bersyarat dan kontrak <i>multiyears</i>	LKPP, Kementerian Keuangan

## NARAHUBUNG PESERTA

**Narahubung : L. Rani Esi Hapsari (WA 0878 6008 8483)**

No	Kementerian/Lembaga	Wilayah Provinsi
1	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kepulauan Bangka Belitung
2	Kementerian Keuangan	Kepulauan Riau
3	Kementerian Ketenagakerjaan	Jambi
4	Kementerian Perindustrian	Riau
5	Kementerian Perdagangan	Lampung
6	Kementerian Pertanian	Aceh
7	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional	Sumatera Barat
8	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Sumatera Utara
9	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Sumatera Selatan
10	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Bengkulu
11	Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional	
12	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	
13	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	
14	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	
15	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	
16	Majelis Permusyawaratan Rakyat	
17	Dewan Perwakilan Rakyat	
18	Dewan Perwakilan Daerah	
19	Badan Pemeriksa Keuangan	
20	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	
21	Badan Amil Zakat Nasional	
22	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	
23	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	
24	Dewan Nasional Keuangan Inklusif	
25	Dewan Pengupahan Nasional	
26	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	
27	Komite Kebijakan Industri Pertahanan	
28	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	
29	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	
30	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	
31	Lembaga Produktivitas Nasional	
32	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	
33	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	
34	Komite Industri Nasional*	
35	Komite Perdagangan Indonesia*	
36	Otoritas Jasa Keuangan	
37	Lembaga Penjamin Simpanan	

**Narahubung : Firdo Budi Prasetya (WA 0857 2523 4858)**

<b>No</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Wilayah Provinsi</b>
1	Kementerian Dalam Negeri	Banten
2	Televisi Republik Indonesia	Jawa Barat
3	Radio Republik Indonesia	DKI Jakarta
4	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	Kalimantan Timur
5	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	Kalimantan Selatan
6	Kepolisian Republik Indonesia	Kalimantan Barat
7	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Kalimantan Tengah
8	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Kalimantan Utara
9	Komisi Kepolisian Nasional	
10	Dewan Pertahanan Nasional*	
11	Mahkamah Agung	
12	Mahkamah Konstitusi	
13	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
14	Komisi Penyiaran Indonesia	
15	Lembaga Kerja Sama Tripartit	
16	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
17	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
18	Komisi Pemberantasan Korupsi	
19	Dewan Ketahanan Nasional	
20	Badan Intelijen Negara	
21	Kementerian Luar Negeri	
22	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	
23	Ombudsman Republik Indonesia	
24	Komisi Banding Paten	
25	Komisi Informasi Pusat	
26	Komisi Kejaksaan	
27	Kementerian Pertahanan	
28	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	
29	Komisi Yudisial	
30	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	
31	Otoritas Nasional Senjata Kimia	
32	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)	
33	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
34	Kejaksaan Agung RI	
35	Lembaga Sensor Film	
36	Dewan Pers	

**Narahubung : Astri Erviana (WA 0877 7442 7745)**

<b>No</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Wilayah Provinsi</b>
1	Kementerian Kesehatan	Jawa Tengah
2	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan	Daerah Istimewa Yogyakarta
3	Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia	Bali
4	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	Nusa Tenggara Timur
5	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Nusa Tenggara Barat
6	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	Maluku Utara
7	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Maluku
8	Konsil Kedokteran Indonesia	
9	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	
10	Konsil Keperawatan PMK	
11	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	
13	Komite Akreditasi Nasional	
14	Komite Profesi Akuntan Publik	
15	Dewan Insinyur Indonesia	
16	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	
17	Arsip Nasional Republik Indonesia	
18	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
19	Badan Kepegawaian Negara	
20	Komisi Aparatur Sipil Negara PMK	
21	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	
22	Badan Pertimbangan Kepegawaian	
23	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	
24	Lembaga Administrasi Negara	
25	Kementerian Agama	
26	Badan Pengelolaan Keuangan Haji	
27	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
28	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
29	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	
30	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	
31	Komisi Pemilihan Umum	
32	Badan Pengawas Pemilihan Umum	
33	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
34	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	
35	Kementerian Pemuda Dan Olahraga	
36	Kementerian Sosial	
37	Dewan Jaminan Sosial Nasional SMK	
38	Komisi Nasional Disabilitas	
39	Badan Pusat Statistik	
40	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	
41	Badan Narkotika Nasional	



**Narahubung : Cherish (WA 0878 6580 6137)**

<b>No</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Wilayah Provinsi</b>
1	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Jawa Timur
2	Kementerian Sekretariat Negara	Gorontalo
3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sulawesi Barat
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sulawesi Tengah
5	Kementerian Perhubungan	Sulawesi Utara
6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sulawesi Tenggara
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sulawesi Selatan
8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Papua Barat
9	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Papua
10	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)	Papua Selatan
11	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Papua Tengah
12	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	Papua Pegunungan
13	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Papua Barat Daya
14	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	
15	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)	
16	Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batn)	
17	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	
18	Sekretariat Kabinet	
19	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	
20	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	
21	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	
22	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	
23	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores	
24	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	
25	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	
26	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	
27	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	
28	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	
29	Dewan Energi Nasional	
30	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	
31	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	
32	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	
33	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	
34	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	
35	Dewan Pertimbangan Presiden	
36	Dewan Sumber Daya Air Nasional	
37	Kantor Staf Presiden	
38	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	
39	Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	
40	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	

**Narahubung : Cherish (WA 0878 6580 6137)**

<b>No</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>
41	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
42	Komite Nasional Keamanan Penerbangan
43	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
44	Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*
45	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
46	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura
47	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi